

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Daerah Kota Kupang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam hal ini adalah proses pengelolaan modul yang belum dilaksanakan secara maksimal, keterlambatan pemrosesan data serta gangguan server yang sering terjadi, maupun dari segi pengelolaan (*human eror*).
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (1) Pemahaman pengguna terhadap aplikasi SIPKD yang masih minim (SDM) (3) Kurangnya sosialisasi dari pimpinan ke setiap SKPD.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang maka saran yang di berikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan SIPKD yang berkaitan dengan modul yang belum dijalankan secara maksimal dan akan lebih baik jika mengusahakan agar tidak melebihi batas waktu dalam pelaporan keuangan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan seperti minimnya sosialisasi dari pimpinan ke seluruh pekerja, seharusnya SIPKD dirancang untuk diimplementasikan, pimpinan mengambil kebijakan dengan mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawai sehingga pegawai memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan. (2010) . *Sistem Informasi Manajemen*, Gorontalo: Fecon-Unisan.
- Bastian, I (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakart: Erlangga
- Bodnar, H. George dan Wiliam S. Hopwood (Amir Abdi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, penerjemah). 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana Anastasia.dan Setiawti Lilis. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://dosenit.com/kuliah-it/sistem-informasi/karakteristik-sistem-informasi/>.  
Diakses pada 28 maret 2021
- <http://stieasiakel12-simb.blogspot.com/2015/01/pengendalian-sistem-informasi>.  
Diakses pada 28 maret 2021
- <https://www.kompasiana.com/ghaniyatul/pengguna-informasi-sistem-informasi-manajemen-sim>. Diakses pada 28 maret 2021
- <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/28/pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd/>. Diakses pada 28 maret 2021
- Jogiyanto, H.M 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta. Penerbit ANDI
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*), Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Utama, I Made. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali*. Diakses pada 26 maret

Yusup, Maulana. 2016. *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Diakses pada 29 maret 2021